

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESIAPSIAGAAN BENCANA GEMPA BUMI DI KOTA PADANG

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Magister
Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*

**OLEH
INDRY
1720842002**

**PEMBIMBING 1 : DR. ALFAN MIKO, M.SI
PEMBIMBING 2 : DR. RONI EKHA PUTERA, S.IP, M.SI**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

ABSTRAK

Nama : Indry
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi di Kota Padang

Tesis ini membahas tentang implementasi Kebijakan Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi di Kota Padang. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Kota Padang merupakan daerah yang berpotensi tinggi akan bencana gempa bumi. Kondisi ini tentunya harus disikapi dengan cepat dan serius oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar tidak menimbulkan kerugian. Menyikapi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Kota Padang telah mengeluarkan kebijakan, diantaranya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. Namun setelah beberapa tahun kebijakan tersebut ditetapkan, kondisi Kota Padang saat ini dinilai masih belum siap dalam menghadapi ancaman akan bahaya tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana implementasi kebijakan kesiapsiagaan bencana gempa bumi di Kota Padang. Penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan kebijakan penanggulangan bencana di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan tipe studi kasus deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dengan teknik pemilihan informan purposive sampling. Unit analisis dalam penelitian ini adalah BPBD Kota Padang. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan kesiapsiagaan bencana gempa bumi di Kota Padang belum berjalan efektif. Dalam implementasi kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa sumber daya yang dimiliki oleh BPBD masih kurang baik dari kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut dipengaruhi oleh finansial, dimana rendahnya anggaran yang diperoleh BPBD dalam menjalankan kebijakan masih belum memadai.

Kata Kunci : Kesiapsiagaan Bencana, Gempa Bumi, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

Name : Indry
Program Study : Masters of Public Administration
Title : Implementation of Earthquake Preparedness Policy in Padang City

This thesis discusses the implementation of the Earthquake Disaster Preparedness Policy in Padang City. This study is motivated by the condition of Padang City as an area with high potential for earthquake disasters. This condition certainly must be addressed quickly and seriously by the Central Government and Regional Governments so as not to cause losses. Responding to Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, the City of Padang has issued policies, including Regional Regulation Number 3 of 2008 concerning Disaster Management. However, after a number of years the policy was set, the current condition of the City of Padang was judged to be not ready to face the threat of danger. Therefore, the problem is how the earthquake disaster preparedness policy is implemented in Padang City. The study was aimed at describing disaster management policies in the city of Padang. This research uses the theory of policy implementation according to Van Meter and Van Horn. The study was conducted qualitatively with a descriptive case study type. Data collection using in-depth interviews with purposive sampling informant selection techniques. The unit of analysis in this study is the Padang City BPBD. The results of the study can be concluded that the earthquake disaster preparedness policy in the city of Padang has not been able to run effectively. In implementing the policy it can be seen that the resources owned by the BPBD are still low both in quantity and quality. This is influenced by finance, where the low budget obtained by the BPBD in implementing policies is still inadequate.

Keywords: Disaster Preparedness, Earthquakes, Policy Implementation

